

ANALISIS KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN DALAM Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Di Kota Medan

Amalia Nasution¹⁾, Amanda Afriza Putri²⁾, Dinda Trikania³⁾, Rizka Sabila Ritonga⁴⁾,
Tri Utami Salsabila⁵⁾, Sari Wulandari⁶⁾

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

⁶ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

email: amalianst03@gmail.com, amandaafrizaputri@gmail.com, dindatrikania2@gmail.com,
rizkasabilaritonga@gmail.com, triutamisalsabila@gmail.com, sariwulandari@umnaw.ac.id

Abstract

Poverty is a complex and multidimensional social problem faced by many regions in Indonesia, including Medan City. Medan City, as one of the largest economic centers on the island of Sumatra, faces major challenges in dealing with poverty issues that are not only economic in dimension, but also related to access to education, health, and other basic services. Therefore, poverty alleviation in Medan City must be seen within the framework of sustainable development that is oriented towards improving the quality of life of the community as a whole. This study aims to analyze the policies implemented by the government to alleviate poverty in Medan and evaluate their effectiveness. The research employs a qualitative approach with descriptive analysis of secondary data from official documents, government reports, and related literature. The findings indicate that various policies, such as social assistance programs, job training, and community empowerment, have yielded positive impacts. However, challenges in implementation, such as unequal distribution and lack of community participation, remain significant obstacles. Recommendations are provided to enhance stakeholder synergy and leverage technology in the distribution of aid programs.

Keywords: Poverty, Public Policy, Medan City

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks dan multidimensional yang dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia, termasuk Kota Medan. Kota Medan, sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, menghadapi tantangan besar dalam menangani persoalan kemiskinan yang tidak hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga terkait dengan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Oleh karena itu, penanggulangan kemiskinan di Kota Medan harus dilihat dalam kerangka pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda global sejak diperkenalkannya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(Sustainable Development Goals, SDGs) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2015. SDGs mencakup 17 tujuan utama, dengan tujuan pertama adalah "Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di mana pun". Dalam konteks ini, kebijakan anti kemiskinan di Kota Medan memiliki peran strategis untuk mendukung pencapaian target SDGs, khususnya tujuan 1 (mengentaskan kemiskinan), tujuan 8 (pertumbuhan ekonomi yang inklusif), dan tujuan 10 (mengurangi ketimpangan) [1].

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kota Medan menunjukkan fluktuasi selama periode 2019 hingga 2023:

**Tabel 1 Tingkat Kemiskinan di Kota Medan
(2019-2023)**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)
2019	155,3	8,75
2020	162,1	9,12
2021	170,8	9,45
2022	165,4	9,20
2023	160,0	8,85

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan sempat mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2020 dan 2021, terutama akibat dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan perekonomian. Namun, penurunan pada tahun 2022 dan 2023 mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi serta efektivitas beberapa program pemulihan yang diterapkan pemerintah.

Kemiskinan di Kota Medan memiliki karakteristik khas, seperti tingginya konsentrasi penduduk miskin di kawasan urban tertentu dengan akses terbatas terhadap layanan publik. Pemerintah Kota Medan telah meluncurkan sejumlah kebijakan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta program peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Namun, apakah kebijakan ini mendukung pembangunan berkelanjutan? Untuk menjawabnya, penting untuk menganalisis kebijakan yang diterapkan berdasarkan tiga pilar pembangunan berkelanjutan:

- 1) Pilar Sosial: Apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa meninggalkan kelompok rentan?
- 2) Pilar Ekonomi: Apakah program-program tersebut menciptakan peluang kerja, memberdayakan masyarakat miskin, dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif?
- 3) Pilar Lingkungan: Apakah kebijakan tersebut memperhatikan dampak lingkungan jangka panjang?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan anti kemiskinan yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Medan dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan berbasis teori, diharapkan dapat dievaluasi dampaknya terhadap masyarakat dan diidentifikasi strategi kebijakan yang lebih inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tetapi juga mempercepat pencapaian target SDGs di tingkat daerah.

1) Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan sosial seperti pendidikan dan kesehatan [6]. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan minimum, yang mencakup Garis Kemiskinan Pangan (GKP) dan Garis Kemiskinan Non-Pangan (GKN). Dalam konteks Indonesia, kemiskinan sering dikaitkan dengan ketimpangan pendapatan, keterbatasan akses terhadap layanan publik, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia [9].

2) Teori Kapabilitas (Amartya Sen)

Teori kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen memandang kemiskinan bukan sekadar masalah kekurangan pendapatan, tetapi ketidakmampuan individu untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai bermakna. Dalam konteks ini, kemiskinan diukur melalui ketidakmampuan seseorang untuk memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, peluang kerja dan kebebasan sosial.

- a. Relevansi terhadap Kebijakan Anti Kemiskinan: Kebijakan harus dirancang untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat miskin. Misalnya, program pelatihan kerja, peningkatan kualitas pendidikan, dan akses

kesehatan dapat memperluas pilihan masyarakat untuk hidup lebih sejahtera. Hal ini sejalan dengan prinsip *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan 1 (*No Poverty*) dan tujuan 4 (*Quality Education*).

3) Teori Kebutuhan Dasar (Paul Streeten)

Teori kebutuhan dasar berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok manusia, seperti pangan, air bersih, kesehatan, perumahan dan pendidikan.

- a. Prinsip Utama: Masyarakat hanya dapat berkembang secara produktif jika kebutuhan dasar mereka terpenuhi terlebih dahulu. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan yang hanya fokus pada bantuan finansial tanpa memperhatikan akses terhadap layanan dasar tidak akan efektif.
- b. Relevansi terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Pemenuhan kebutuhan dasar merupakan langkah awal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, terutama tujuan 1 (mengentaskan kemiskinan) dan tujuan 6 (*clean water and sanitation*).

4) Teori Keadilan Sosial (John Rawls)

John Rawls, dalam bukunya *A Theory of Justice*, menekankan pentingnya pemerataan kesempatan dan distribusi sumber daya yang adil. Prinsip utamanya mencakup:

1. Kebebasan yang Setara: Setiap individu berhak mendapatkan akses yang sama terhadap peluang sosial dan ekonomi.
2. Prinsip Perbedaan: Ketimpangan ekonomi dapat diterima jika membawa manfaat bagi kelompok masyarakat paling miskin.

Relevansi terhadap Kebijakan Anti Kemiskinan: Pemerintah harus merancang kebijakan yang fokus pada pengurangan kesenjangan, misalnya melalui redistribusi sumber daya, seperti program bantuan langsung tunai (BLT), atau peningkatan akses pendidikan untuk kelompok marginal. Hal ini mendukung tujuan SDGs 10 (*Reduced Inequalities*) [2].

5) Pembangunan Inklusif (UNDP)

Konsep pembangunan inklusif menekankan pada beberapa aspek yang mendukung seperti berikut:

1. Partisipasi semua kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, termasuk kelompok miskin dan rentan.
2. Penurunan ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi dan sosial.
3. Pembangunan yang tidak hanya menargetkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan hasilnya.

Prinsip Utama: Pembangunan berkelanjutan tidak dapat dicapai jika sebagian besar masyarakat tertinggal. Oleh karena itu, kebijakan anti kemiskinan harus inklusif, memastikan semua kelompok masyarakat mendapat manfaat.

Relevansi terhadap SDGs: Tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*) dan tujuan 10 (*Reduced Inequalities*) berakar pada prinsip ini, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan penurunan ketimpangan sosial.

6) Pendekatan Ekosistem Sosial (Bronfenbrenner)

Pendekatan ini memandang kemiskinan dalam kerangka sistem sosial yang saling terkait, mencakup:

1. Individu: Kebutuhan dasar, kapabilitas, dan keterampilan
2. Keluarga: Dukungan sosial dan ekonomi dari keluarga
3. Komunitas: Lingkungan sosial, termasuk akses terhadap layanan publik
4. Kebijakan makro: Program pemerintah, seperti bantuan sosial dan kebijakan ekonomi

Relevansi terhadap Kebijakan Anti Kemiskinan: Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan konteks lokal dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah. Pendekatan ini

mendukung pencapaian tujuan SDGs 16 (*peace, justice, and strong institutions*).

7) Teori Triple Bottom Line (Elkington)

Teori ini mengaitkan keberlanjutan dengan tiga pilar utama seperti:

1. Profit (Ekonomi): Kebijakan harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. *People* (Sosial): Kebijakan harus mengutamakan kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin.
3. Planet (Lingkungan): Kebijakan tidak boleh merusak lingkungan.

Relevansi terhadap Pembangunan Berkelanjutan: Kebijakan anti kemiskinan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketiga aspek ini. Misalnya, program pemberdayaan UMKM tidak hanya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin tetapi juga mendorong praktik bisnis ramah lingkungan, mendukung tujuan SDGs 12 (*responsible consumption and production*).

Kajian teori ini menunjukkan bahwa kebijakan anti kemiskinan yang efektif harus berbasis pada pendekatan multidimensional dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi teori kapabilitas, kebutuhan dasar, keadilan sosial, pembangunan inklusif, dan triple bottom line, kebijakan dapat dirancang untuk mendukung pencapaian SDGs sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin secara berkelanjutan [10].

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur untuk menganalisis kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan. Metode studi literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi dan data dari berbagai sumber terpercaya, sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Teknik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder berupa dokumen resmi pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), laporan pemerintah Kota Medan dan artikel jurnal ilmiah yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi perhatian global melalui kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs). Kota Medan, sebagai salah satu pusat ekonomi terbesar di Pulau Sumatera, menghadapi kompleksitas persoalan kemiskinan yang tidak hanya terkait pendapatan, tetapi juga mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar.

Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, pemerintah Kota Medan telah meluncurkan sejumlah kebijakan, di antaranya Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, efektivitas kebijakan ini perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas, yaitu bagaimana kebijakan tersebut mendukung pembangunan berkelanjutan, yang mencakup tiga pilar utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan.

A. Evaluasi Kebijakan Berdasarkan Pilar Pembangunan Berkelanjutan

1) Pilar Sosial

Pilar sosial pembangunan berkelanjutan menekankan pada upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok rentan. Di Kota Medan, kebijakan BLT dan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan langkah nyata untuk mendukung pilar ini. BLT memberikan bantuan finansial langsung kepada masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sementara JKN memberikan akses layanan kesehatan yang lebih

luas. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini:

- a. Cakupan yang terbatas: Tidak semua masyarakat miskin terdata dan menerima bantuan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya integrasi data antara instansi pemerintah.
- b. Minimnya pemberdayaan: BLT lebih bersifat bantuan sementara dan belum mendorong kemandirian masyarakat miskin.

Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, kebijakan sosial harus lebih berorientasi pada pemberdayaan, seperti pelatihan kerja dan program pendidikan vokasi yang memberikan keterampilan bagi masyarakat miskin agar mereka dapat keluar dari siklus kemiskinan.

2) Pilar Ekonomi

Pilar ekonomi menekankan pada penciptaan peluang kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kota Medan telah melaksanakan program pemberdayaan UMKM sebagai upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat miskin. Program ini melibatkan pemberian modal usaha dan pelatihan bagi pelaku UMKM. Pemberdayaan UMKM memiliki dampak positif pada pengurangan angka kemiskinan, namun tantangan yang dihadapi adalah:

- a. Kurangnya akses pasar: Banyak UMKM menghadapi kesulitan dalam memasarkan produk mereka secara lebih luas.
- b. Ketimpangan akses modal: UMKM yang berada di daerah pinggiran atau dikelola oleh kelompok rentan, seperti perempuan, sering kali menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber pendanaan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan, kebijakan pemberdayaan UMKM perlu lebih diarahkan ke sektor ekonomi yang berkelanjutan, seperti usaha berbasis energi terbarukan atau produk ramah lingkungan, untuk

mendukung pilar ekonomi sekaligus pilar lingkungan.

3) Pilar Lingkungan

Pilar lingkungan sering kali kurang menjadi perhatian dalam kebijakan anti kemiskinan di Kota Medan. Program yang ada lebih berfokus pada aspek sosial dan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Misalnya, pemberdayaan UMKM belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung praktik bisnis ramah lingkungan.

Pembangunan berkelanjutan mengharuskan setiap kebijakan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan. Kota Medan dapat mengintegrasikan program pelatihan kerja yang berbasis teknologi hijau, seperti pelatihan dalam bidang energi terbarukan atau pengelolaan limbah. Hal ini akan menciptakan lapangan kerja baru sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan [11].

B. Kebijakan Berdasarkan Teori

1) Teori Kapabilitas (Amartya Sen)

Teori ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi keterbatasan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan yang bermakna [5]. Kebijakan seperti peningkatan akses pendidikan dan kesehatan di Kota Medan mencerminkan upaya peningkatan kapabilitas masyarakat.

Namun, kebijakan yang ada belum cukup komprehensif untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin. Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan pasar menjadi solusi untuk memperluas kapabilitas masyarakat miskin dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama SDG 4 (*Quality Education*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*).

2) Teori Kebutuhan Dasar (Paul Streeten)

Pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan menjadi

langkah awal dalam pengentasan kemiskinan. Kebijakan BLT dan JKN telah memberikan dampak positif, tetapi belum mampu menjangkau semua kelompok rentan di Kota Medan.

Untuk mencapai keberlanjutan, kebijakan ini perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pekerjaan dan sumber daya ekonomi.

3) Teori Keadilan Sosial (John Rawls)

Teori ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya yang adil untuk memastikan kelompok rentan mendapatkan manfaat [3]. Di Kota Medan, distribusi bantuan sosial seperti BLT sering kali tidak merata, dengan beberapa wilayah miskin yang belum mendapatkan akses yang memadai. Kebijakan redistribusi harus diperbaiki melalui penggunaan teknologi digital, seperti sistem *e-government*, untuk memastikan distribusi bantuan yang lebih transparan dan merata.

4) Pembangunan Inklusif (UNDP)

Pembangunan inklusif menekankan pentingnya melibatkan semua kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok rentan lainnya, dalam proses pembangunan [8]. Kota Medan perlu memperluas partisipasi perempuan dalam program pemberdayaan UMKM, karena partisipasi mereka masih rendah dibandingkan laki-laki.

5) Triple Bottom Line (Elkington)

Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara profit (ekonomi), people (sosial), dan planet (lingkungan). Kebijakan anti kemiskinan di Kota Medan masih berfokus pada aspek ekonomi dan sosial tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang mendukung UMKM berbasis teknologi hijau dan penggunaan energi ramah lingkungan.

C. Tantangan dan Peluang

- 1) Tantangan
 - a. Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan;
 - b. Pendanaan yang terbatas untuk program pembangunan berkelanjutan;
 - c. Minimnya integrasi aspek lingkungan dalam kebijakan.
- 2) Peluang
 - a. Digitalisasi untuk transparansi distribusi bantuan;
 - b. Kemitraan multi-stakeholder antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;
 - c. Penggunaan data berbasis teknologi untuk perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Kebijakan anti kemiskinan di Kota Medan telah memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi belum sepenuhnya terintegrasi dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk mendukung SDGs, kebijakan perlu diarahkan pada pendekatan holistik yang mencakup pemberdayaan masyarakat miskin, penciptaan lapangan kerja yang ramah lingkungan, dan distribusi bantuan yang adil. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memastikan keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Kota Medan. Berikut adalah beberapa tabel pendukung yang relevan untuk pembahasan tentang kemiskinan di Kota Medan. Tabel ini mencakup data kemiskinan, indikator sosial-ekonomi, serta evaluasi program kebijakan.

Tabel 2 Data Kemiskinan di Kota Medan (2019-2023)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase Kemiskinan (%)	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)
2019	145.60	8,94	514.200

9	0		
202	160.75	9,20	536.500
0	0		
202	170.80	9,45	558.800
1	0		
202	150.40	8,95	570.000
2	0		
202	142.30	8,62	590.300
3	0		

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Tabel tersebut menggambarkan data kemiskinan di Kota Medan selama periode 2019-2023 yang menunjukkan fluktuasi jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Pada 2019, terdapat 145.600 jiwa penduduk miskin (8,94%) dengan garis kemiskinan sebesar Rp514.200 per kapita per bulan. Jumlah ini meningkat pada 2020 menjadi 160.750 jiwa (9,20%) dan terus bertambah pada 2021 menjadi 170.800 jiwa (9,45%) dengan garis kemiskinan masing-masing sebesar Rp536.500 dan Rp558.800. Namun, sejak 2022, jumlah penduduk miskin mulai menurun menjadi 150.400 jiwa (8,95%) dan berlanjut pada 2023 menjadi 142.300 jiwa (8,62%), meskipun garis kemiskinan terus meningkat hingga Rp590.300. Data ini menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk miskin setelah 2021, sementara standar kebutuhan minimum untuk hidup layak terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 3 Indikator Sosial Ekonomi Kota Medan (2022)

Indikator	Nilai	Keterangan
Angka pengangguran terbuka	8,12%	Masih di atas rata-rata nasional (5,86%)
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	80,14 %	Kategori tinggi
Rasio gini	0,41%	Ketimpangan sedang
Akses	85%	Belum

sanitasi layak	merata di beberapa wilayah pinggiran
Akses air minum layak	89% Perluasan jaringan air bersih masih berjalan

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Tabel tersebut menunjukkan kondisi sosial ekonomi Kota Medan pada tahun 2022. Tingkat pengangguran terbuka di Kota Medan sebesar 8,12%, masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang mencapai 5,86%, sehingga mencerminkan tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang memadai. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada pada angka 80,14%, yang masuk kategori tinggi dan mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang cukup baik. Namun, rasio gini yang sebesar 0,41 menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan yang tergolong sedang. Dari segi infrastruktur dasar, akses sanitasi layak mencapai 85%, meskipun distribusinya belum merata di beberapa wilayah pinggiran. Sementara itu, akses terhadap air minum layak sebesar 89%, namun perluasan jaringan air bersih masih perlu ditingkatkan untuk menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Secara keseluruhan, meskipun Kota Medan telah menunjukkan beberapa kemajuan, masih ada tantangan dalam pemerataan pembangunan dan pengurangan ketimpangan sosial.

Tabel 4 Evaluasi Program Bantuan Sosial di Kota Medan (2020-2023)

Program	Cakupan	Total	Efektifitas	Kendala
Bantuan Lang	80.000	120	Membutuhkan	Data penerima

sung Tuna i (BLT)			an dasar	tidak akur at, distri busi lamb at
Kartu Indo nesia Pinta r (KIP)	40.00 0	30	Meneka n angka putus sekolah	Tida k semu a sisw a misk in terda ftar
Progr am Semb ako	100.0 00	50	Mening katkan akses pangan	Masa lah distri busi di daera h terpe ncil

Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)

Tabel tersebut menunjukkan evaluasi program bantuan sosial di kota Medan (2020-2023), terdapat tiga program utama yang dilaksanakan, yaitu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Program Sembako. Program BLT, dengan cakupan 80.000 Kepala Keluarga (KK) dan alokasi dana sebesar Rp120 miliar, terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, meskipun menghadapi kendala berupa data penerima yang tidak akurat serta distribusi yang lambat. Sementara itu, program KIP yang menasar 40.000 penerima dengan anggaran Rp30 miliar bertujuan menekan angka putus sekolah, namun tidak semua siswa miskin terdaftar sebagai penerima bantuan. Di sisi lain, Program Sembako yang mencakup 100.000 KK dengan total dana Rp50 miliar berhasil

meningkatkan akses pangan masyarakat, tetapi masih terkendala masalah distribusi, terutama di daerah terpencil. Secara keseluruhan, meskipun ketiga program ini memberikan dampak positif bagi masyarakat, penyelesaian kendala dalam pelaksanaannya sangat diperlukan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

D. Tantangan dalam Implementasi

Beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Medan meliputi:

- 1) Keterbatasan Anggaran: Anggaran pemerintah daerah yang terbatas menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program-program skala besar.
- 2) Minimnya Koordinasi antar Pemangku Kepentingan: Ketidaksinkronan antara pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan masyarakat menyebabkan efektivitas program menurun.
- 3) Kendala Kultural: Beberapa masyarakat miskin enggan untuk mengikuti pelatihan atau menerima bantuan karena rendahnya kesadaran akan pentingnya program tersebut.
- 4) Teknologi yang Belum Optimal: Penggunaan teknologi untuk memantau dan mendistribusikan bantuan masih minim, sehingga potensi kebocoran dana cukup besar.

E. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Kebijakan penanggulangan kemiskinan mencakup lima pendekatan seperti berikut:

- 1) Pendekatan Kebutuhan Dasar: Pendekatan ini melihat kemiskinan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi.
- 2) Pendekatan Pendapatan: Pendekatan ini menimbulkan kemiskinan dengan rendahnya akses terhadap aset dan alat produktif, yang mempengaruhi pendapatan serta posisi sosial seseorang.

- 3) Pendekatan Kemampuan Dasar: Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai keterbatasan literasi dan kemampuan dasar, yang menghambat partisipasi dalam pengambilan keputusan.
- 4) Pendekatan Obyektif: Pendekatan ini menilai kemiskinan berdasarkan standar kesejahteraan yang harus dipenuhi untuk keluar dari kemiskinan.
- 5) Pendekatan Subyektif: Pendekatan ini mendasarkan pada analisis pendapatan atau persepsi orang miskin tentang kondisinya [12].

F. Rekomendasi Strategis

Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan penanggulangan kemiskinan, pemerintah Kota Medan disarankan untuk:

- 1) Meningkatkan Akurasi Data Penerima: Pemerintah harus memanfaatkan teknologi seperti sistem informasi terpadu untuk memastikan bahwa data penerima manfaat selalu diperbarui.
- 2) Penguatan Koordinasi: Membangun forum koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta untuk mempercepat pelaksanaan program.
- 3) Pemanfaatan Teknologi Digital: Menggunakan aplikasi berbasis digital untuk mendistribusikan bantuan dan memantau hasil program secara real-time [7].
- 4) Pendekatan Berbasis Komunitas: Melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi.
- 5) Pengembangan Program Berkelanjutan: Fokus pada program jangka panjang, seperti peningkatan akses pendidikan dan pelatihan vokasional, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan langsung [4].

Kota Medan menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kemiskinan, tetapi berbagai kebijakan yang telah diterapkan

menunjukkan hasil yang menjanjikan. Meski begitu, diperlukan strategi yang lebih inovatif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap masyarakat dapat menikmati kesejahteraan yang lebih baik. Dengan sinergi yang kuat antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi modern, Kota Medan memiliki potensi besar untuk mengurangi angka kemiskinan secara signifikan di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Kemiskinan merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh Kota Medan dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui berbagai kebijakan anti kemiskinan, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pemerintah Kota Medan telah berupaya menurunkan angka kemiskinan. Namun, efektivitas kebijakan ini masih menghadapi berbagai hambatan, seperti distribusi bantuan yang tidak merata, kurangnya integrasi antar kebijakan, serta minimnya perhatian terhadap aspek lingkungan.

Kebijakan yang diterapkan sejauh ini telah mendukung beberapa pilar utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama SDG 1 (*No Poverty*), SDG 4 (*Quality Education*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan SDG 10 (*Reduced Inequalities*). Namun, kebijakan ini belum secara optimal mencakup dimensi lingkungan, sehingga belum sepenuhnya mendukung pembangunan berkelanjutan yang holistik.

Berdasarkan teori Kapabilitas, Kebutuhan Dasar, dan Keadilan Sosial, kebijakan di Kota Medan perlu lebih berfokus pada peningkatan kapabilitas masyarakat miskin, pemenuhan kebutuhan dasar yang lebih merata, serta distribusi sumber daya yang adil. Pendekatan pembangunan inklusif dan Triple Bottom Line menunjukkan pentingnya mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam kebijakan.

- 1) Rekomendasi untuk Kebijakan yang Lebih Berkelanjutan
 - a. Meningkatkan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan efektif.
 - b. Mengintegrasikan aspek lingkungan dalam pemberdayaan ekonomi, seperti mendorong UMKM berbasis teknologi hijau dan energi terbarukan.
 - c. Memanfaatkan digitalisasi dan data berbasis teknologi untuk meningkatkan transparansi distribusi bantuan dan pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran.
 - d. Memperluas cakupan program pemberdayaan untuk mencakup kelompok rentan, terutama perempuan dan masyarakat di wilayah miskin.
 - e. Mengalokasikan anggaran yang lebih memadai untuk mendukung program-program pembangunan berkelanjutan.

Dengan langkah-langkah ini, kebijakan anti kemiskinan di Kota Medan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

5. REFERENSI

- [1] A. S. Alisjahbana and E. Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi*. Unpad Press, 2021. Available: <https://doi.org/10.18356/9789210010788>
- [2] M. W. Dewi, R. P. Rahayu, H. Melathi, and L. Kristiyanti, "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Tunai Langsung (BLT)," *JAP: Jurnal Akuntansi dan Pajak*, vol. 25, no. 1, pp. 1–7, 2024.
- [3] Fathurrohman, C. F. Nainggolan, and R. Hidayat, "Analisis Keadilan Sosial dalam Praktik Hukum Hak terhadap Manusia," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, vol. 1, no. 3, pp. 207–215, 2024. Available: <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.276>
- [4] M. Harahap, "Analisis Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kota Medan," *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, vol. 5, no. 2, pp. 85–94, 2023. Available: <https://doi.org/10.51178/jecs.v5i2.1535>
- [5] S. H. Indarti, "Pembangunan Indonesia dalam Pandangan Amartya Sen," *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, vol. 3, no. 1, pp. 35–50, 2023. Available: <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i1.727>
- [6] A. Manullang, R. Pasaribu, R. Nabillah, I. Maipita, and M. Rinaldi, "Analisis Pengaruh Ketimpangan Pendapatan dan Upah Minimum Regional terhadap Kemiskinan di Sumatera Utara," *HEMAT: Journal of Humanities Education Management Accounting and Transportation*, vol. 1, no. 2, pp. 764–772, 2024.
- [7] B. P. P. D. K. Medan, *Strategi Pengentasan Kemiskinan Daerah: Laporan Tahunan 2023*. Medan: Bappeda Kota Medan, 2023.
- [8] F. D. Nailufar, S. G. Sijabat, R. A. Saksono, and A. T. Putri, "Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Pelatihan Perencanaan Pembangunan Inklusif bagi Kepala Desa di Kabupaten Purwakarta," *UN | PENMAS Jurnal Pengabdian Masyarakat Untuk Negeri*, vol. 4, no. 1, pp. 35–50, 2024. Available: <https://doi.org/10.29138/un-penmas.v4i1.2702>
- [9] L. Nur, I. S. Tanjung, M. R. Pane, R. Hidayat, and S. Ulandari, "Peran Pemerintah dalam Penanggulangan Kemiskinan di Sumatera Utara," *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi (EBMA)*, vol. 3, no. 2, pp. 872–879, 2022.

- [10] M. Pinontoan, *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. PT Nasya Expanding Management, 2020.
- [11] A. Said, I. Budiati, H. A. Reagan, Riyadi, A. Hastuti, C. Anam, P. L. Nia, N. Setiyawati, B. Hardika, M. W. Agusta, M. Arifin, R. D. Andriastuti, and D. Tama, *Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) di Indonesia*. Badan Pusat Statistik/Statistics Indonesia, 2021. Available:
[https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3 BPS Potret Awal TPB di Indonesia.pdf](https://filantropi.or.id/pubs/uploads/files/3%20BPS%20Potret%20Awal%20TPB%20di%20Indonesia.pdf)
- [12] Z. Siregar, "Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 64–69, 2019.